

## Kim Jong-un Disebut Coba 'Tantang' Warisan Ayahnya dengan Jabatan Barunya

SEOUL(IM)- Keputusan Kim Jong-un untuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk menjauhkan diri dari warisan ayahnya dan memimpin Korea Utara (Korut) sebelumnya, Kim Jong-il. Hal itu diungkapkan Andrei Lankov, pakar dari Universitas Kookmin di Korea Selatan (Korsel).

Menurutnya, sistem kenegaraan Korut memiliki ciri khusus yang sangat penting untuk prograd. Faktanya adalah ketika Kim Il-sung meninggal, jabatan presiden Korut diserahkan kepada Kim Jong-il, sehingga menjadikan Kim Il-sung 'presiden abadi'.

"Begitu pula ketika Kim Jong-il meninggal dunia. Ia dinyatakan sebagai Sekretaris Jenderal Abadi Partai Buruh Korea. Apalagi, 'keabadian'-nya disebutkan lebih dari satu kali," katanya, seperti dilansir Tass.

Lankov secara khusus mencatat bahwa pada September 2020, sebuah artikel propaganda besar telah muncul di surat kabar Rodong Sinmun, yang mengatakan betapa hebatnya Kim Jong-un dan keputusan kebijakannya untuk menunjuk Kim Jong-il sebagai Sekretaris Jenderal Abadi disebutkan di antara tanda-tanda kebesarannya.

"Jadi, dengan keputusannya yang tidak terduga, Kim Jong-un benar-benar memberikan pukulan telak kepada ayahnya sendiri, yang bukan tindakan paling masuk akal dalam sistem turun-temurun," ujarnya.

"Orang Korut telah lama diberi tahu bahwa mereka memiliki Presiden Abadi Kim Il-sung, Sekretaris Jenderal Abadi Partai Buruh Korea Kim Jong-il dan pemimpin saat ini yang memiliki gelar terpisah. Namun, tiba-tiba, skema indah yang telah ada selama 25 tahun itu runtuh tanpa alasan yang jelas," Lankov menekankan.

Pada saat yang sama, menurut Lankov, "gelar formal" Kim Jong-un bukanlah masalah prinsip, karena tidak ada yang mempertanyakan posisi kepemimpinannya.

"Keputusan Kim Jong-un terlihat agak aneh. Sebenarnya, itu tidak mengubah apa pun, tetapi itu dapat dipandang sebagai tantangan tertentu terhadap warisan ayahnya dan keinginan untuk menjauhkan diri dari warisan itu sampai batas tertentu. Kemungkinan besar itu adalah ambisi pribadi berperen di sana serta keinginan untuk meningkatkan statusnya dari perspektif ritual dan protokol," tukasnya. ● gul



GEDUNG CAPITOL AS JELANG PELANTIKAN PRESIDEN AS

"Field of Flags" disinari cahaya lampu di National Mall saat Gedung Captiol AS bersiap untuk pelantikan Presiden terpilih Joe Biden, di Washington, Amerika Serikat, Senin (18/1).

# 'Kepergian' Trump Bisa Ganggu Pembicaraan Damai Afghanistan

Biden disebut mungkin mencari "peninjauan" atas perjanjian perdamaian Doha antara Washington dan Taliban, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik 19 tahun di Afghanistan.

KABUL(IM) - Sudah terguncang oleh gejolak baru kekerasan, proses perdamaian Afghanistan yang rapuh mungkin menghadapi "masalah", menyusul kepergian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Masa jabatan Trump berakhir pada 20 Januari, atau saat pelantikan Joe Biden.

Sejumlah analis berpendapat bahwa Biden mungkin mencari "peninjauan" atas perjanjian perdamaian Doha antara Washington dan Taliban, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik 19 tahun di Afghanistan.

"Pelaksanaan perjanjian perdamaian Doha dapat menghadapi masalah, terutama batas waktu penarikan pasukan AS

dari Afghanistan, karena dialog intra-Afghanistan tidak benar-benar membuat kemajuan dan kekerasan telah meningkat," Rahimullah Yusufzai, seorang ahli yang berbasis di Peshawar, Pakistan.

Mengutip tuduhan baru dan tuduhan balasan oleh Washington dan Taliban sehubungan dengan lonjakan kekerasan baru-baru ini, meskipun ada komitmen untuk perdamaian dari kedua belah pihak, Yusufzai mengatakan perkembangan baru dapat mendorong pemerintahan Biden untuk meninjau kembali rencana penarikan militer lengkap dari Afghanistan.

Yusufzai mengamati bahwa Biden mungkin menunda

penarikan penuh atau bersikeras mempertahankan sejumlah kecil pasukan di tanah Afghanistan, bahkan setelah Mei dengan dalih "memastikan keamanan AS dan perang melawan terorisme."

November lalu, Biden, menurut media AS, telah mengatakan bahwa dia benar-benar lelah dengan perang terpanjang AS di Afghanistan. Tetapi, menurutnya, ada kebutuhan untuk mengakhiri perang secara bertanggung jawab, dengan cara untuk memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap keamanan dalam negeri AS.

"Lingkaran di dalam Demokrat tidak menginginkan penarikan sepenuhnya. Mereka mungkin memaksa Biden untuk mempertahankan setidaknya satu atau dua pangkalan di Afghanistan, bahkan setelah Mei," kata Yusufzai, merujuk pada penarikan pasukan AS, sebagai bagian dari kesepakatan Doha.

Kekerasan yang meningkat di Afghanistan mungkin memberikan alasan bagi Biden

untuk meminta peninjauan kembali perjanjian Doha," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency.

Sementara itu, analis dan komentator politik yang berbasis di Kabul, Syed Eaqbal, juga melihat prospek pergeseran, meski tidak terlalu drastis, dalam kebijakan AS menuju proses perdamaian Afghanistan.

"Tidak ada keraguan bahwa dorongan terakhir di Washington telah bergeser selama bertahun-tahun dari mengalahkan Taliban di medan perang, menjadi apa yang disebut jalan keluar 'bermartabat' dari Afghanistan, tetapi keluarnya pasukan dari Afghanistan akan berbeda di bawah presiden baru," katanya.

Namun, menurut Salman Bashir, mantan Menteri Luar Negeri Pakistan, tidak melihat pembalikan proses perdamaian, meskipun ada perubahan pemerintahan di Washington dan tantangan yang membayangi.

"Saya pikir, baik Demokrat maupun Republik ingin keluar dari Afghanistan. Biden harus

merangkul pandangan geo-ekonomi Afghanistan dan wilayah ini karena tidak ada pilihan lain yang layak," jelas Bashir.

"Jalan alternatif akan mengungkap prospek perdamaian dan menjerumuskan negara ke dalam perang saudara dan divisi de facto," dia memperingatkan.

AS sendiri, kata Bashir, tidak dapat menyelesaikan keruwetan Afghanistan dan perlu bekerja sama dengan Rusia, China, dan negara-negara kawasan lainnya untuk penyelesaian yang tahan lama dari konflik yang sudah lama membara.

Berbagai pandangan yang sama, Yusufzai mengatakan, dia tidak melihat pembalikan total rencana penarikan pasukan AS oleh presiden yang akan datang meskipun ada lonjakan kekerasan. "Dia tidak dapat melakukan itu, bahkan jika dia mau karena itu (perjanjian Doha) adalah langkah yang populer, dan kepemimpinan politik dan militer AS pada umumnya mendukung itu. Taliban juga ingin mengakhiri perang," tukasnya. ● tom

## Kesepakatan Bebas Visa UEA-Israel Akhirnya Ditangguhkan

JAKARTA(IM) - Uni Emirat Arab (UEA) telah menangguhkan penerapan perjanjian pembebasan visa dengan Israel. Penangkuhan ini dilakukan sebagai upaya UEA dalam membendung penyebaran virus korona.

Pembebasan visa untuk warga negara UEA-Israel merupakan buah dari kesepakatan pada 15 September 2020, sebagai tanda peresmian normalisasi hubungan kedua negara.

Tetapi Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa UEA telah menangguhkan perjanjian pembebasan visa hingga 1 Juli 2021.

Warga kedua negara bisa mendapatkan visa melalui maskapai mereka, seperti yang dilakukan puluhan ribu orang sejak pakta normalisasi.

"Israel mewajibkan siapa pun yang masuk dari negara Teluk itu dikarantina sebagai tindakan pencegahan COVID-19," kata pejabat Israel

dilansir dari Alarabiyah, pada Selasa (19/1).

Sejak pengumuman penangkuhan, Kementerian Kesehatan Israel turut buka suara dan mewajibkan siapa pun yang datang dari UEA agar dikarantina. Mereka akan dibawa ke "motel virus corona" yang dikelola militer untuk karantina selama 10 dan 12 hari.

Israel sebelumnya telah mengecualikan UEA dari daftar pantauannya atas apa yang disebut negara "merah". Namun UEA dengan populasi 9 juta, telah mengalami lonjakan kasus baru-baru ini, dengan infeksi baru melebihi 3.000 per hari untuk pertama kalinya.

Israel, yang populasinya hampir sama, juga telah berjuang melawan pandemi bahkan saat negara itu menerapkan program vaksinasi tercepat di dunia. Kementerian Kesehatan Israel telah mencatat lebih dari 5.000 kasus baru per hari pada pekan ini. ● ans

## Pelantikan Biden Dihantui Kekacauan, AS Bersiap untuk yang Terburuk

WASHINGTON(IM) - Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan berlangsung Rabu (20/1) waktu Washington. Otoritas Amerika sedang mempersiapkan yang terburuk saat kelompok ekstremis bersumpah akan membuat kekacauan.

Tema 20 Januari, ketika Joe Biden dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat, adalah "America United" atau "Amerika Bersatu".

Tetapi kurang dari dua minggu setelah gerombolan pendukung Presiden Donald Trump yang mengamuk di Gedung Capitol AS membuat pelantikan Biden dibayangi kecemasan. Amuk massa pro-Trump pada 6 Januari lalu menewaskan lima orang termasuk seorang petugas polisi.

Kelompok-kelompok ekstremis telah bersumpah akan ada kekacauan pada hari Rabu. Anggota Kongres Partai Demokrat Seth Moulton mengatakan kepada The Guardian bahwa bala bantuan massal telah dikirim ke Washington D.C., di mana ada lebih banyak pasukan militer saat ini daripada di Afghanistan.

Pemilik toko senjata di seluruh negeri mengatakan mereka tidak dapat memenuhi permintaan, di mana outlet-outlet kehabisan amunisi dan senjata yang nyaris habis.

Garda Nasional telah diaktifkan di setidaknya 19 negara bagian, di mana penguji rasa bersenjata berat menyerukan kelompok-kelompok ekstrem dari kedua ujung spektrum politik untuk bersatu melawan pemerintah AS. Para pemrotes bersenjata berat bahkan memperingatkan akan pecahnya "perang saudara kedua" karena mereka terus menolak kemenangan Biden dalam pemilihan presiden (pilpres) 3 November 2020 lalu.

"Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghindari pemerintahan tirani atau perang saudara yang berdarah dan tidak ada gunanya di antara orang-orang Amerika, yang tidak memiliki banyak hal melawan satu sama lain dan memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang mereka sadari," kata seorang milisi bersenjata, yang bersekutu

dengan kelompok anti-pelantikan Biden; Boogaloo Boys, di tangga Gedung Kongres Michigan.

"Pesan kami kepada pemerintah adalah, kami datang dengan damai. Kami tidak bermaksud untuk melakukan kekerasan, tapi saya memohon dengan air mata berlinang dan suara saya pecah, jika Anda terus menindas rakyat Amerika, mereka tidak akan rasional lagi," ujarnya.

Dalam peringatan buletin intelijen bersama pekan lalu, otoritas federal memperingatkan pelanggaran memetakan 6 Januari di Washington DC akan berfungsi sebagai "pendorong kekerasan yang signifikan" bagi kelompok milisi bersenjata dan ekstremis rasis yang menargetkan pelantikan Biden.

"Para ekstremis yang bertu-juan untuk memicu perang ras dapat mengeksploitasi akibat pelanggaran Capitol dengan melakukan serangan untuk mengacaukan dan memaksa konflik klimaks di Amerika Serikat", tulis para pejabat dalam buletin yang dikeluarkan oleh Pusat Kontra-Terorisme Nasional dan Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri.

Ibu kota di negara bagian medan pertempuran utama—di mana Presiden Donald Trump yang lengser mengarahkan tuduhan tak berdasar tentang kecurangan pemilu—dalam siaga tinggi. Gedung-gedung Capitol ditutup, dipagari dan dibatasi oleh polisi dan pasukan militer. "Ini mengguncang semua orang, Anda tahu, melihat apa yang terjadi di Capitol," kata Kepala Departemen Kepolisian Miami Jorge Colina kepada The New York Times.

"Ini memberi Anda perasaan tidak nyaman yang mengerikan, dan karena itu, mereka khawatir dengan itu. Mereka prihatin dengan pola pikir, 'Apakah kita aman di sini, di negara ini?'"

Di Washington D.C., persiapan untuk pelantikan Biden telah membuat jalan-jalan sepi dan bisnis serta transportasi umum ditutup. Para penduduk berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat begitu banyak senjata dalam hidup mereka. ● gul

## Arab Saudi Eksekusi Mati 27 Orang Sepanjang 2020

RIYADH(IM) - Arab Saudi mengakui pada hari Senin (18/1) bahwa 27 orang telah dieksekusi mati di kerajaan pada tahun 2020. Dua kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan jumlah eksekusi itu tercatat sebagai yang terendah sejak 2013.

Reprieve dan European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) dalam pernyataan bersama hari Senin mengatakan penurunan jumlah eksekusi sebagian terkait dengan lockdown virus corona baru (Covid-19), serta moratorium "tidak resmi" pada eksekusi untuk beberapa pelanggaran non-kekerasan.

Komisi HAM yang dikelola pemerintah Arab Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 27 eksekusi mati pada tahun 2020 mewakili penurunan 85 persen dari tahun sebelumnya. Di masa lalu, seringnya penggunaan hukuman mati di Arab Saudi, termasuk dalam eksekusi massal, telah menuai kritik dan ketenangan internasional kerajaan sebagai pemimpin global dalam hukuman mati, bersama dengan Tiongkok dan Iran.

Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS), yang menjabat sebagai penguasa sehari-hari kerajaan, berbicara di depan umum tentang penghapusan hukuman mati untuk beberapa kejahatan dua tahun lalu. Pada bulan April,

pemerintah mengumumkan bahwa anak di bawah umur tidak lagi menghadapi hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu.

Seorang pejabat Saudi mengatakan kepada The Washington Post pada bulan Agustus lalu bahwa kerajaan sedang dalam proses merevisi hukuman untuk kejahatan terkait narkoba dan bahwa keputusan untuk menghapus hukuman mati untuk pelanggaran semacam itu diharapkan segera terjadi.

Menurut Reprieve, hampir 40 persen dari sekitar 800 eksekusi mati yang dilakukan di kerajaan selama lima tahun terakhir adalah untuk kejahatan seperti perdagangan narkoba.

Namun berbulan-bulan kemudian, pemerintah Saudi belum mengumumkan perubahan resmi dalam hukuman untuk pelanggaran terkait narkoba dan belum menerbitkan dekrit kerajaan yang akan meresmikan moratorium eksekusi anak.

Menurut kelompok tersebut, setidaknya tiga orang dihukum mati di Arab Saudi karena kejahatan yang diduga dilakukan ketika mereka masih remaja. Mereka memperingatkan bahwa jumlah orang yang dihukum mati bisa meningkat lagi tahun ini.

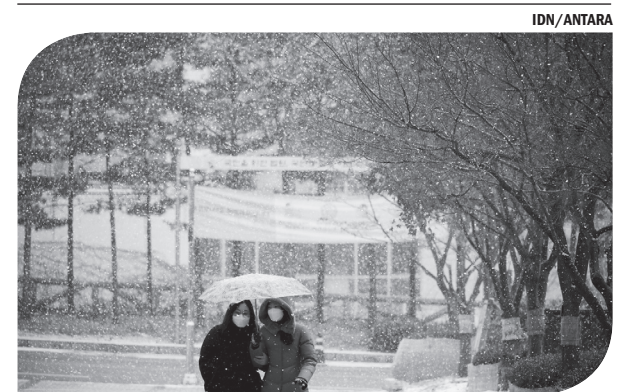
James Suzano, Direktur Hukum ESOHR, pelanggaran narkoba dan kejahatan non-

kekerasan lainnya termasuk dalam kategori pelanggaran di Arab Saudi yang dikenal sebagai "tazir", di mana hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Eksekusi terakhir untuk kejahatan semacam itu di kerajaan adalah 14 Januari 2020.

Eksekusi berikutnya tahun lalu dijatuhkan pada orang-orang yang dihukum karena pembunuhan atau penyerangan yang diperburuk.

Pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia Saudi pada hari Senin menyatakan bahwa larangan hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba terus berlanjut. "Moratorium atas pelanggaran terkait narkoba berarti kerajaan memberikan kesempatan kedua kepada lebih banyak penjahat nir-kekerasan," kata Awwad Alawwad, presiden komisi tersebut.

Maya Foa, direktur Reprieve, mengatakan bahwa kemajuan nyata yang dibuat di Arab Saudi jelas didorong oleh keinginan untuk membersihkan citra internasionalnya. "Jika Mohammad bin Salman serius tentang reformasi, Arab Saudi harus membebaskan para pemuda yang dihukum mati karena kejahatan masa kanak-kanak dan menerbitkan undang-undang yang melindungi 'kelelai narkoba' yang rentan dari eksekusi," katanya. ● ans



HUJAN SALJU DI SEOUL - KORSSEL

Wanita yang memakai masker sebagai langkah mencegah tertular penyakit virus korona (COVID-19) berjalan di bawah payung saat turun salju di Seoul, Korea Selatan, Senin (18/1).

## 2 Hakim Agung Wanita di Afghanistan Tewas Ditembak

KABUL(IM)-Dua orang hakim agung wanita yang bertugas di Mahkamah Agung Afghanistan tewas ditembak orang tidak dikenal di Ibu Kota Kabul, pada Senin (18/1) kemarin. Dilansir Reuters, Selasa (19/1), insiden berdarah itu terjadi pada pukul 08.30 waktu setempat.

Menurut keterangan polisi, orang tidak dikenal awalnya mendekati mobil yang ditumpangi kedua hakim itu. Pelaku lantas memberondong kendaraan itu, hingga menewaskan kedua hakim.

Sementara sopir yang mengemudikan mobil itu mengalami luka-luka. Akibat insiden itu, kelompok Taliban kembali menjadi sorotan. Namun, mereka membantah dan menyatakan tidak ada anggota mereka yang terlibat pembunuhan terhadap dua hakim perempuan itu.

Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, lantas menerbitkan pernyataan mengecam aksi kekerasan terhadap warga sipil oleh Taliban dan kelompok bersenjata lainnya. Dalam pernyataan itu, Ghani menyatakan aksi teror bukan jalan keluar

terhadap permasalahan di Afghanistan. Dia juga meminta Taliban melakukan gencatan senjata secara permanen.

Taliban menyatakan mereka tidak terlibat dalam gelombang aksi kekerasan belakangan ini. Namun, Taliban mengatakan anggota mereka akan bergerak secara mandiri untuk melenyapkan tokoh-tokoh penting di pemerintahan.

Padahal, saat ini pemerintah Afghanistan dan Taliban tengah melakukan perundingan damai. Aksi kekerasan itu membuat situasi Kabul menjadi semakin tegang. Tercatat sejumlah kalangan mulai dari pejabat, polisi hingga wartawan turut menjadi korban meninggal akibat penembakan hingga serangan bom.

Menurut sumber, kedua belah pihak akan mengamati dulu kebijakan pemerintah Amerika Serikat setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joe Biden-Kamala Harris. Saat ini pemerintah AS sudah menarik mundur sebagian pasukan mereka dari Afghanistan hingga hanya menyisakan 2.500 personel. ● gul



PERAYAAN EPIFANI ORTODOK - MOSKOW

Seorang pria menceburkan diri ke air es sungai Istra saat perayaan Epifani Ortodok di kota Istra, wilayah Moskow, Rusia, Senin (18/1).